



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Rapat ke         | : | 11 ( <i>Sebelas</i> )  |
| Tahun Sidang     | : | 2020-2021  |
| Masa Persidangan | : | IV   |
| Jenis Rapat      | : | Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN   |
| Hari, Tanggal    | : | Kamis, 18 Maret 2021   |
| Pukul            | : | 10.00 WIB  |
| Sifat Rapat      | : | Terbuka  |
| Pimpinan Rapat   | : | Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  |
| Sekretaris Rapat | : | Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI  |
| Tempat           | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar<br>Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270  |
| A c a r a        | : | Pembahasan mengenai pembentukan holding ultra mikro  |
| Hadir            | : | 1. 40 orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI;<br>2. Menteri BUMN, Erick Thohir beserta jajarannya;<br>3. Wamen II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta jajarannya;<br>4. Dirut PT. BRI (Persero) Tbk;<br>5. Dirut PT. Pegadaian (Persero); dan<br>6. Dirut PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). |

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri BUMN pada pukul 10.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 18 Maret 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

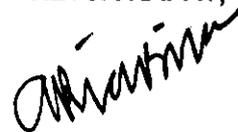
## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mendukung pembentukan  *Holding Ultra Mikro*  dan memahami  *Rights Issue*  BRI Dengan Cara Mengalihkan Seluruh Saham Seri B Negara pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) kepada BRI sepanjang Pemerintah masih mempunyai kontrol penuh untuk PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) melalui saham Dwi Warna.
2. Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah akan memastikan penguatan kontrol Pemerintah terhadap anak perusahaan BUMN melalui saham Dwi Warna dalam revisi UU BUMN.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk:
  - a. Memastikan pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dapat meningkatkan jangkauan layanan kepada seluruh pelaku sektor Ultra Mikro di seluruh wilayah Indonesia serta berkontribusi pada peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pra-sejahtera di Indonesia.
  - b. Membuat target kinerja yang spesifik dan terukur atas pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro sehingga efektifitas Holding BUMN Ultra Mikro dapat dievaluasi dengan baik kedepannya.
  - c. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap Holding BUMN Ultra Mikro sehingga pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di sektor Ultra Mikro.
  - d. Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional di masing-masing BUMN yang terlibat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
  - e. Holding BUMN Ultra Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terkait dengan intergrasi dan pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan BUMN terkait untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.17 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA  
A-189